

Relasi-relasi Kuasa dalam Praktik Agama Hindu yang 'Ditemciptakan' di Bali¹

I Nyoman Wijaya
Universitas Udayana
Email: iwijasyastsp@yahoo.co.id

Abstract

The purpose of this study is to discuss the relations of power in the history of the contemporary Hindu religion in Bali. The concept of power relations refers to the concept of Power and Discourse of Michel Foucault, while the term "invented religion" is a development of Invented Tradition by Eric Hobsbawm. "Invented religion" in this study is defined as the practice of Hindu religion, which was invented, constructed, and officially manifested; and the religious practice which emerged in a relatively short time; and in a few years it has been regarded as an established religion. Based on the concept of Power and Discourse of Foucault, I argue that there are relations of power that shape and sustain the practice of "invented religion." I will try to find the power relations in a God worshipping discourse in Samuantiga and Jagatnatha temples. There are two research questions that I raise for the argument, namely how and why these two discourses emerge and thrive in contemporary's practice of Hinduism? The answer to both questions will be sought at the present Balinese-Hindu intellectual thought. Then, it is assessed using the Genealogy Method of Foucault. My conclusion is that the presence of the two discourses is only to harmonize Hinduism with Islam as the majority religion in Indonesia.

Keywords: power relations, "invented religion", discourse and power, intellectual of Hinduism-Bali.

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mendiskusikan relasi-relasi kuasa dalam sejarah kontemporer agama Hindu di Bali. Konsep

1 Tulisan ini merupakan revisi dari paper berjudul "Power Relations in The Practice of Hindu 'Invented Religion' in Bali yang penulis sajikan dalam Cosmopolis Conference, di Yogyakarta 20-22 Juni 2014.

relasi-relasi kuasa mengacu pada *Power and Discourse* dari Foucault, sedangkan istilah “invented religion” merupakan pengembangan dari *invented tradition* milik Eric Hobsbawm. Karena itu “invented religion” dalam studi ini diartikan sebagai praktik agama Hindu yang ditemuipraktikan, dibangun, dan diwujudkan secara resmi, dan tradisi yang muncul dalam waktu relatif singkat, yang dalam beberapa tahun saja dianggap sebagai praktik agama Hindu yang mapan. Berdasarkan konsep *Power and Discourse of Foucault*, muncul asumsi ada relasi-relasi kuasa yang membentuk dan mempertahankan praktik agama yang ditemuipraktikan. Relasi-relasi kuasa tersebut akan dilihat pada wacana pemujaan Tuhan di Pura Samuantiga and Jagatnatha. Pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana dan mengapa dua wacana tersebut muncul dan berkembang dalam praktik agama Hindu masa kini? Jawaban pertanyaan penelitian tersebut akan dicari pada pemikiran intelektual Bali Hindu masa kini dengan memakai Metode Genealogi Foucault. Kesimpulan sementara adalah kehadiran kedua wacana tersebut hanya untuk menyelaraskan agama Hindu dengan Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia.

Kata kunci: relasi-relasi kuasa, “invented religion”, wacana dan kekuasaan, dan intelektual Bali-Hindu.

Pendahuluan

Masyarakat Bali Hindu pada umumnya memuja roh leluhur yang disebut *batara*. Namun di sisi lain ada pula yang langsung memuja Tuhan, baik sebagai Trimurti maupun Sang Hyang Tunggal.² Praktik pemujaan Tuhan dalam wujudnya sebagai Trimurti dapat dilihat di Pura Samuantiga. Sejumlah intelektual Bali masa kini mengatakan Pura Samuantiga dibangun pada abad X masa pemerintahan Gunapriya Darma Patni dan Udayana. Pura ini awalnya merupakan tempat berlangsungnya musyawarah tokoh-tokoh agama untuk menyelesaikan persoalan konflik sekte di Bali. Hasilnya, sebelas

2 Trimurti adalah Tuhan dalam bentuknya sebagai Dewa Brahma, Wisnu, dan Shiva, sedangkan Sang Hyang Tunggal adalah Tuhan dalam bentuknya sebagai Tuhan Yang Maha Esa, seperti yang terdapat dalam sila pertama Pancasila

sekte keagamaan berhasil dilebur menjadi tiga yaitu, agama-agama yang menyembah dewa Brahma, Wisnu, dan Shiva, yang disebut Trimurti. Keberhasilan itu itu tidak terlepas dari peranan Mpu Kuturan (“Sejarah Pura Samuantiga,” <http://nyomanadnyana.blogspot.co.id/diakses> 15 Mei 2014).

Sementara pemujaan Tuhan sebagai Sang Hyang Tunggal berlangsung di Pura Jagatnatha. Seorang intelektual Bali Hindu masa kini, Ida Pandita Nabe Sri Bhagawan Dwija Warsa Nawa Sandhi dari Geria Tamansari Lingga Ashrama, Singaraja mengatakan pura ini didirikan di Denpasar pada tahun 1970-an, lalu disusul oleh kabupaten lainnya. Pada mulanya pura ini dibangun untuk para pendatang di Kota Denpasar. Sesuai tradisi semua pura di Bali, kecuali Pura Besakih merupakan tempat bersembahyang untuk penduduk lokal seperti yang dikonsepsikan Mpu Kuturan melalui Pura Kahyangan. Oleh karena itu para pendatang di Denpasar perlu dibuatkan pura umum. Namun Pura Jagatnata akhirnya berkembang menjadi seolah-olah dikelola oleh pemerintah, sehingga tidak lagi menjadi tempat bersembahyang bagi pendatang, melainkan juga untuk masyarakat umum, terutama para pegawai negeri dan pelajar (“Pura Jagatnatha,” <http://stitidharma.org/15> Mei 2014).

Di dalam Pura Jagatnatha terdapat sebuah altar pemujaan yang disebut Palinggih Padmasana. Altar ini merupakan tempat tinggal bagi Tuhan Yang Maha Esa dalam konsep vertikal yang diwujudkan dalam Tripurusha, meliputi Shiva, Sada Shiva, dan Parama Shiva. Sang Hyang Tripurusha berarti Tuhan sebagai jiwa agung alam semesta, yang meliputi *Bhur* Loka disebut Shiva (jiwa Tuhan di alam bawah), *Bhuwah* Loka disebut Sadha Shiva (jiwa Tuhan di alam tengah), *Swah* Loka disebut *Swah* Loka (jiwa Tuhan di alam atas). Tuhan dalam konsep ini ditempatkan pada kuil Padmatiga di Pura Besakih. I Ketut Gobyah, “Memuja Batara Tri Purusa,” <http://www.balipost.co.id/diakses> 15 Mei 2014.

Sementara Tuhan dalam konsep horizontal yang diwujudkan dalam Trimurti, yakni Brahma, Wisnu, dan Shiva belum ada di dalam Pura Jagatnatha. Atas dasar itu mereka mengusulkan membangun altar pemujaan Trimurti dalam bentuk Batara

Hyang Guru di Pura Jagatnatha supaya terjadi keseimbangan antara konsep vertikal dan horizontal.³ Selain itu perlu juga dipikirkan adanya kuburan bagi kaum pendatang, seperti yang terdapat di Kuburan Kayubuntul, Singaraja (Desa Adat Buleleng) (“Pura Jagatnatha,” <http://stitidharma.org/> 15 Mei 2014).

Berdasarkan uraian di atas, ada dua wacana masa kini yang menarik untuk diteliti, yakni, Pertama, pada abad ke-10 di Bali terjadi konflik antara 11 aliran keagamaan. Konflik tersebut dapat diselesaikan dengan cara meleburnya menjadi tiga aliran keagamaan yang disebut Trimurti. Tuhan dalam perwujudannya sebagai Trimurti dipuja di Pura Samuantiga. Kedua, tahun 1970-an muncul kesadaran untuk menghormati hak-hak para migran untuk bersembahyang kepada Tuhan di Kota Denpasar, karena itu didirikan sebuah pura yang disebut Pura Jagatnatha. Dari dua wacana di atas, intelektual Bali Hindu itu ingin menyampaikan pesan bahwa baik konsep Trimurti maupun Sang Hyang Tunggal (Tuhan Yang Maha Esa) dibentuk semata-mata untuk menjawab kepentingan internal umat Hindu di Bali.

Persoalan di atas dikaji dengan memakai metode Genealogi dari Foucault (Evans, 1997 : 8). Dalam metode ini disebutkan bahwa fakta sejarah tidak pernah netral, karena dia terikat pada nilai-nilai yang tersembunyi untuk memberikan keuntungan tertentu kepada penuturnya. Oleh karena itu, sejarah seharusnya dicurigai karena penuh dengan hal-hal yang menyesatkan. Untuk menemukan kepalsuan tersebut, maka sejarah harus digali kembali atau dibongkar (Moeflich Hasbullah/ <https://moeflich.wordpress.com/> 19 Oktober 2012).

3 Mpu Kuturan membuat konsep pemujaan kepada Sang Hyang Tunggal (Tuhan Yang Maha Kuasa). Konsep tersebut kemudian digunakan untuk membuat simbol Tapak Dara, yakni pertemuan antara garis mendatar dengan garis atas bawah menjadi tanda '+'. Tapak Dara merupakan simbol dari Lingga dan Yoni, sebagai pemujaan terhadap Ciwa Budha di Bali. Lingga digambarkan sebagai kelamin laki-laki, sedangkan Yoni adalah landasan Lingga yang melambangkan kelamin wanita. Garis horisontal adalah simbol Budha dan yang vertikal adalah simbol Ciwa. Garis horisontal dikenal sebagai Trimurti, sedangkan yang vertikal disebut Tripurusha. Trimurti adalah simbol Brahma, Wisnu, Iswara (Budha) yang ditempatkan pada altar pemujaan Rong Tiga, sedangkan Tripurusha adalah Ciwa, Sadaciwa, Paramaciwa (Ciwa) ditempatkan pada altar pemujaan Padmasana. Lihat, “Ciwa-Budha-Konsep Dasar,” <http://satwic-spiritual.blogspot.co.id/> 17 Mei 2014.

Berdasarkan cara kerja metode ini, permasalahan utama dalam studi ini dijabarkan ke dalam dua pertanyaan penelitian. Pertama, apakah wacana pemujaan Tuhan dalam konsep Trimurti di Pura Samuantiga yang terwariskan hingga masa kini merupakan kesinambungan dari praktik pemujaan yang serupa di masa lampau? Kedua, mengapa wacana pemujaan Tuhan pada altar padmasana dalam konsep Sang Hyang Tunggal (Tuhan yang Maha Esa) di Pura Jagatnatha bisa muncul dan berkembang dalam praktik pemujaan agama Hindu pada masa kini?

Sumber-sumber yang digunakan untuk menjawab kedua pertanyaan di atas dicari dan ditemukan dalam berbagai sumber dengan menggunakan alat bantu berupa teori Wacana dan Kekuasaan dari Michel Foucault. Dalam teori ini disebutkan, bahwa pada setiap wacana terdapat relasi yang saling terkait antara ungkapan wacana, pengetahuan yang melandasinya, dan relasi kekuasaan yang beroperasi di baliknya. Setiap wacana menyatu dengan kekuasaan yang beroperasi di baliknya; dan juga tidak bisa dipisahkan dari relasi kekuasaan yang tersembunyi di baliknya, yang merupakan produk dari praktik kekuasaan. Sifat kekuasaan dalam teori Foucault tersebut bukan sentralistik, melainkan plural, yang tumbuh dari berbagai ruang perifer, dan ada di mana-mana (Piliang, 2004: 223).

Berdasarkan teori Wacana dan Kekuasaan dari Foucault tersebut, maka muncul sebuah asumsi bahwa wacana para intelektual Bali-Hindu mengenai kemunculan konsep Trimurti pada abad X dan Sang Hyang Tunggal (Tuhan Yang Maha Esa) pada abad XX mengandung relasi-relasi kuasa. Asumsi tersebut didasarkan pada adanya kejanggalan sejarah, sebab jika memang benar bahwa agama Shiva Budha di Bali digambarkan sebagai pertemuan antara garis vertikal dan horizontal menjadi Tapak Dara yang disimbolkan dengan tanda '+', lalu kenapa peristiwa terjadi dalam rentang waktu tujuh abad?

Kejanggalan tersebut menunjukkan ada orang-orang yang menangkap suatu pengetahuan tersembunyi di balik sebuah ungkapan wacana besar untuk dijadikan sebagai kekuasaan demi kepentingan kelompok yang mereka wakili yakni pemeluk

agama Hindu. Wacana apakah itu? Jawaban pertanyaan ini akan dicari dengan menempatkan agama Hindu di Bali dalam konteks sejarah nasional pada dekade 1950-an, terutama dalam kaitannya dengan agama Islam.

Dengan membiarkan fakta berbicara apa adanya seperti di atas, maka itu berarti teori Wacana dan Kekuasaan dari Foucault telah dimodifikasi, sebab dia tidak pernah menganjurkan untuk mencari relasi-relasi kekuasaan pada kelompok intelektual Bali-Hindu. Foucault tidak mencari relasi-relasi kekuasaan pada kuasa represif, struktur politis, tuan dan hamba, pemerintah, dan kelas sosial dominan. Ia menaruh perhatian pada mekanisme dan strategi kuasa. Ia tidak berbicara tentang apa itu kuasa, melainkan bagaimana kuasa dipraktikkan, diterima, dan dilihat sebagai kebenaran (*Basis*, No. 01 – 02, 2002 : 34).

Foucault mencari kekuasaan di tempat-tempat yang tersulit, antara lain pada kinerja perasaan, cinta, kesadaran, pengamatan dokter, dan perubahan yang berdampak luas dalam bidang ilmu seperti biologi dan linguistik. Kekuasaan tidak mencerminkan kelas (borjuis) atau elite penguasa maupun atribut-atributnya. Menurut Foucault kekuasaan adalah strategi yang diakibatkan oleh fungsi (disposisi, manuver, taktik, dan teknik). Kekuasaan tidak berasal dari ekonomi maupun politik, karena memang dia tidak ada dasarnya. Dia bertahan sebagai jaringan kompleks yang tidak terbatas pada kekuasaan mikro dan tidak pula dari hubungan yang meresap pada setiap aspek kehidupan sosial. Kekuasaan tidak hanya menindas, tetapi juga mencipta (Foucault, 1980 : 114); dan yang diciptakan oleh kekuasaan adalah kebenaran, karena itu dia juga punya legitimasi. Dengan kata lain, kekuasaan bukan sekadar sesuatu yang *memaksa, menyensor, memeras, menutupi*, dan *menyembunyikan*, melainkan juga bersifat produktif, menghasilkan realitas, domain objek dan ritual kemerdekaan (Philpott, 2003 : 22).

Berdasarkan kerangka konsep dan teori tersebut, langkah awal yang dilakukan dalam studi ini adalah meneliti wacana-wacana praktik keagamaan pada masa Bali Kuno, sehingga pertanyaan penelitian pertama bisa terjawab. Jika tidak

dapat dibuktikan konsep Trimurti di masa kini merupakan kesinambungan dari praktik pemujaan yang serupa di masa lampau, maka untuk sementara waktu bisa dikatakan wacana tersebut adalah suatu praktik agama yang ditemuipertakan (“invented religion”). Hal serupa juga dilakukan untuk pertanyaan penelitian yang kedua.

Penjelajahan ke Masa Lampau

Hasil penelitian para arkeolog, baik akademik maupun otodidak menunjukkan tidak pernah ada penggunaan konsep Trimurni dan Sang Hyang tunggal di zaman Bali Kuno (Goris, 1948; Shastri, 1963; Sirikan, 1956; Surasmi, 2007). Mereka hanya berbicara tentang pergantian rezim kekuasaan, agama yang dianutnya, dan tinggalan-tinggalan prasastinya. Tidak pula terbukti, telah terjadi konflik agama, sebab setiap rezim kekuasaan cenderung bersikap toleran terhadap agama lain, yang bukan menjadi agama kerajaannya, sehingga pertemuan Samuantiga perlu diragukan kebenarannya. Lalu bagaimana dengan setelah masa penaklukan Majapahit?

Berbeda dengan zaman Bali Kuno, pasca penaklukan Majapahit, di Bali tidak ada lagi raja yang merayakan suatu peristiwa dengan cara membuat prasasti. Lempengan tembaga, perunggu, dan batu yang dulu dipakai sebagai media untuk pembuatan prasasti diganti dengan daun lontar. Oleh karena itu, sekarang ini Bali memiliki empat jenis sumber sejarah tradisional yang ditulis di dalam daun rontal, yakni purana, piagem, prakempa, dan babad.⁴

Setiap generasi biasanya selalu menyalin kembali substansi sumber-sumber sejarah tradisional miliknya, sehingga sangat

4 Purana adalah naskah yang dijadikan sebagai sumber acuan tentang sejarah sebuah pura. Cerita dalam purana berkisah tentang para raja dan keturunannya yang dikaitkan dengan keberadaan para dewa di gunung-gunung. Piagem adalah naskah yang berisikan kisah tentang leluhur dalam kaitannya dengan purana dan prasasti suatu pura. Prakempa adalah naskah yang berisikan kisah atau jejak leluhur di suatu desa. Sedangkan babad adalah naskah mengenai kisah atau jejak pengalaman leluhur yang dikaitkan dengan nama-nama tertentu. Peristiwa yang dikisahkan di dalam babad berasal dari berbagai sumber termasuk tradisi lisan, suara orang yang sedang kerasukan roh halus, dan hasil perenungan.

sulit dimungkiri masuk-masuknya unsur-unsur kepentingan pribadi atau kelompok dalam proses pengerjaannya. Oleh karena itu sangat sulit menggunakan sumber-sumber sejarah di zaman kekuasaan Majapahit di Bali sebagai alat ukur untuk mengetahui asal usul suatu wacana keagamaan masa kini. Sebab akan dijumpai begitu banyak versi mengenai suatu wacana. Sebagai jalan keluarnya, peristiwa-peristiwa sejarah yang disebutkan di dalam sumber-sumber tradisional tersebut harus diposisikan sebagai sebuah fakta mental, sehingga tidak perlu lagi diuji kadar keaslian dan keabsahannya.

Relatif banyak fakta mental ditemukan pada pasca penaklukan Majapahit itu, antara lain penggunaan istilah *Shiva* untuk menyebutkan nama Tuhan, yang meliputi paramashiva, saddhashiva, dan mahashiva. *Shiva* dipuja pada altar *padmasana*, yang disebut sebagai tempat pemujaan terhadap *bhatara Shivaraditya* [planet matahari]. Puncak altar pemujaan Padmasana yang bergambar arca Acintya merupakan simbol dari Shiva Acintya atau Shiva Raditya sebagai Mahashiva dan diyakini telah menyatu dengan Sang Hyang Widhi (Tuhan). Pada bagian badan [*madya*] padmasana ada hiasan pahatan angsa yang merupakan kendaraan Dewa Brahma. Pada bagian dasar *padmasana* terdapat arca *Benawang Nala* [kura-kura] sebagai arca perwujudan Dewa Wisnu. Secara kesatuan, menurut Ida Bagus Sideman, hiasan dalam *padmasana* menunjukkan adanya konsep *Trimurti*, yaitu Shiva sebagai *padmasana* [*swah loka*], Brahma sebagai badan tengah [*bwah loka*], dan Wisnu sebagai dasar [*bhur loka*] (Sidemen, 133-134).

Namun menurut Stuart-Fox, kemunculan altar pemujaan *padmasana* dalam arsitektur pura di Bali untuk dipersembahkan kepada Danghyang Nirartha sebagai pendiri kelompok keturunan brahmana Siwa. Keberadaan *padmasana* sebagai altar pemujaan utama di Pura Besakih baru dimulai sejak awal abad XIX. Namun bentuknya bukan *padmasana* tunggal seperti yang umum dikenal sekarang ini di Bali, melainkan *padmasana tiga*, yakni tiga altar pemujaan yang dibentuk menjadi satu kesatuan. Setiap altar pemujaan berdiri di atas fondasi altar berbentuk

seekor *Bedawang Nala* yang dililit oleh naga kosmik Basuki dan Antaboga. Altar pemujaan tersebut dipandang sebagai tempat pemujaan Tuhan dalam wujud tripurusa, yakni Shiva, Sadashiva, dan Paramashiva (Stuart-Fox, 2010 : 94-95)

Dengan demikian, ada dua pendapat berbeda mengenai altar pemujaan *padmasana*. Sejarawan Ida Bagus Sideman mengatakan Danghyang Nirartha adalah pencipta *padmasana* tunggal. Sedangkan Stuart-Fox berpendapat *padmasana* bukan diciptakan oleh Danghyang Nirartha, melainkan hanya sebuah persembahan untuknya. Cukup sulit memperoleh jawaban, mana yang benar dari dua pendapat ini. Akan tetapi, ada suatu hal yang bisa dipetik dua ahli tersebut, sebab baik Sideman maupun Stuart-Fox sama-sama mengatakan bahwa *padmasana* tunggal adalah tempat pemujaan Siwa-Raditya, yakni Siwa sebagai penguasa matahari. Ini merupakan satu dari sekian banyak sebutan Tuhan dalam ajaran Saiva Sidantha di Bali. Fakta tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan abad XIX di Bali belum dikenal istilah Sang Hyang Tunggal dalam pengertiannya sebagai Tuhan Yang Maha Esa seperti yang terungkap dalam sila pertama Pancasila.

Jika demikian adanya, lalu kapan konsep Sang Hyang Tunggal mulai digunakan di Bali? Di zaman pemerintahan kolonial Belanda, orang-orang Bali pada umumnya menyebut sesuatu yang Ilahi itu sebagai Sang Hyang Embang (Swelengrebel, 1960 : 71-73). Namun para intelektual Bali-Hindu pada zaman itu lebih senang memakai istilah *Shiva*. Pada tahun 1929, salah seorang dari mereka mengatakan, Shiva harus diartikan dengan dua jalan, yakni lahir dan batin. Secara batin, *Shiva* adalah Sanghyang Wisesa, sedangkan secara lahir *Shiva* adalah raja (*Bali Adnjana*, Tahoen VI, 27 November 1929 : 4).

Istilah Sang Hyang Tunggal yang disebut pula Sang Hyang Widhi baru muncul tahun 1937,⁵ namun belum ada kesatuan pandang dalam pelaksanaannya. Dalam salah satu

5 Mudah diduga kemunculan istilah tersebut tidak terlepas dari adanya pengaruh kelompok Kristen yang kala itu sudah memakai istilah Ida Sang Hyang Widhi Wasa untuk menyebut nama Allah.

artikel yang ditulis tahun itu oleh Gde Panetja, disebutkan, pada saat menyembah Sang Hyang Widhi, pikiran harus diarahkan pada satu tujuan dengan cara memikirkan siapa yang sedang disembah. Menurut Panetja, demi mudahnya memusatkan pikiran, maka dibuatkan altar pemujaan berupa patung yang disebut sebagai tempat tinggal Sang Hyang Widhi. Namun objek yang disembah bukan patung, melainkan Sang Hyang Widhi yang diyakininya duduk di atasnya (*Djatajoe*, No. 4, 25 November 1937 : 97-98).

Tidak ada sumber yang menyebutkan konsep Sang Hyang Widhi sudah terpakai dalam praktik keagamaan kala itu. Hanya saja, dalam artikel itu Panetja menganalogikan Sang Hyang Widhi sebagai raja. Disebutkan, sekalipun raja hanya seorang diri, namun selaku penguasa dunia ia memiliki banyak pekerja bawahan. Karena itu rakyat bukan hanya menghormati raja, melainkan juga semua pejabat kerajaan mulai dari yang menduduki jabatan tertinggi sampai yang terendah (*Djatajoe*, No. 4, 25 November 1937 : 97-98). Sang Hyang Widhi juga punya bawahan, yakni para dewa. Oleh karena itu, tidak ada salahnya menghormati para dewa, meskipun kepada yang derajatnya terendah sekalipun. Lagi pula setelah diperas, dewa-dewa itu akan tersimpul menjadi satu, yakni Shiva, artinya semuanya adalah bagian darinya.

Biarpun sudah ada bukti orang Bali memuja Shiva, namun tidak begitu saja bisa dikatakan mereka menganut agama Shiva, sebab agama Shiva di India berbeda dengan yang Bali. Karena itu lebih tepat kiranya menyebut agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Bali sebagai agama campuran. Agama campuran artinya agama Bali yang bercampur dengan peradaban Hindu. Unsur peradaban Hindu dalam agama Bali terlihat dari penggunaan veda dalam upacara keagamaan. Berdasarkan pemikiran seperti itu, mereka mengatakan lebih pantas menyebut agama Bali sebagai agama Bali Hindu, artinya agama Bali bercampur Hindu. Akan tetapi, Hindu bukan merupakan nama agama melainkan nama suatu negeri. Di negeri Hindu (India) ada bermacam-macam agama, sehingga

tidak benar pula jika mengatakan agama Bali sebagai Hindu Bali (*Djatajoe*, No. 4, 25 November 1937 : 97-98).

Pada tahun 1949 mayoritas intelektual Bali Hindu sepakat menamai agama sebagai Agama Tirta dan pendeta Shiva-Buddha adalah gurunya (Notulen Verslang (*sic*) dari Congress PPP di Singaradja 16 s/d 19 Nopember 1949:9). Kesepakatan itu dianulir pada tahun 1952 dalam suatu rapat agama di Tampaksiring. Mayoritas peserta rapat sepakat untuk memakai nama agama Hindu Bali. Pada tahun 1954 nama agama Hindu Bali sudah digunakan untuk surat-surat dinas pemerintahan di Bali. Jadi, sejak tahun itu nama Hindu Bali mulai digunakan untuk urusan administratif. Namun, ada juga intelektual Bali Hindu yang tidak sepakat dengan keputusan tersebut. Mereka ingin memakai nama agama Hindu, sebab ada perbedaan makna antara agama Hindu dengan Hindu Bali (*Bhakti*, No. 6, Tahun III, 15 Maret 1954: 1).

Perdebatan nama agama baru berhenti setelah Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Surat Ketetapan Nomor 1 tahun 1965. Dalam surat ketetapan tersebut diputuskan bahwa agama Hindu (bukan Hindu Bali) adalah agama yang sederajat dengan agama-agama lainnya dan sudah memperoleh pengakuan dari Pemerintah Republik Indonesia (*Suluh Marhaen* Edisi Bali, 29 Nopember 1968).

Pengaruh Islam Politik

Fakta-fakta yang terungkap dalam uraian di atas, memperlihatkan bahwa konsep Trimurti dan Sang Hyang Tunggal terutama jika diartikan sebagai Tuhan Yang Maha Esa (seperti dalam sila pertama Pancasila) adalah sebuah “invented religion.” Oleh karena itu, aktivitas keagamaan yang bersumber pada kedua wacana tersebut dapat pula disebut sebagai sebuah praktik agama yang ditemuipkan, dibangun, dan diwujudkan secara resmi. Bisa pula disebut sebagai sebuah praktik keagamaan yang muncul dalam waktu relatif singkat, yang dalam beberapa tahun saja sudah dianggap sebagai sebuah praktik agama Hindu yang mapan, peninggalan zaman

dulu. Faktor apa yang mematangkan kelahiran kedua wacana tersebut?

Faktor-faktor tersebut harus dicari pada klaim intelektual Islam politik pada awal tahun 1950-an, yang menyebutkan butir pertama dalam Pancasila (Ketuhanan Yang Maha Esa) hanya ditemukan dalam agama-agama monotheis. Kementerian Agama Republik Indonesia (KARI) hanya mengakui keberadaan agama-agama yang sudah memiliki nabi dan kitab suci saja, sehingga agama Hindu Bali tersingkir, hanya menjadi sebuah aliran kepercayaan (Howe, 2001 : 147)

Para intelektual Bali lalu bersatu untuk menghadapi tantangan dari pihak Kementerian Agama Republik Indonesia tersebut. Mereka segera menerjemahkan istilah Tuhan Yang Maha Esa ke dalam bahasa Bali menjadi Ida Sang Hyang Widhi (Swellengrebel, 1960 : 71–73). Namun, kelompok Islam politik di dalam Kementerian Agama Republik Indonesia belum puas. Pada 28 Desember 1950 mereka mengirim utusan ke Bali untuk meminta penjelasan mengenai identitas agama Bali, yang meliputi nama agama, filsafat dan kepercayaan ketuhanan, keberadaan sekolah agama, nama kitab suci dan ritual serta makna-makna persembahyangan (Anandakusuma, 1966 : 84-85).

Sejak munculnya peristiwa tersebut, terjadilah pergolakan dalam agama Bali. Seperti terlihat dari lahirnya sejumlah organisasi sosial-keagamaan, melengkapi yang sudah sebelumnya, antara lain Majelis Hinduisme, yang berasaskan Hinduisme dan bertujuan untuk menyelaraskan adat dan agama Hindu Bali dengan perkembangan zaman modern (“Anggaran Dasar Madjelis Hinduisme,” dokumen); Wiwadha Shastra Sabhha yang bertujuan untuk mempelajari dan mendiskusikan naskah-naskah agama Hindu Bali (Bakker, 1993 : 227); dan Panti Agama Hindu Bali yang bercita-cita ingin memperdalam pengetahuan tentang filsafat agama Hindu Bali, menyederhanakan upacara agama Hindu Bali, dan mengubah adat istiadat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman (Bakker, 1993 : 85-86).

Pada 10 Juni 1951 para pimpinan organisasi sosial-

keagamaan di Bali mengadakan rapat untuk membahas tuntutan dari pihak Kementerian Agama Republik Indonesia. Mereka sepakat mengirim hasil keputusan rapat tersebut kepada Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta dan pejabat-pejabat penting lainnya di negeri ini (Bakker, 1993 : 85-86). Hasil keputusan rapat tersebut berisi empat tuntutan, antara lain penempatan wakil-wakil agama Bali dalam kantor-kantor agama, pembentukan panitia penyusunan kitab ajaran agama Bali, tunjangan biaya hidup untuk para pemimpin agama, dan sumbangan dana kepentingan agama. Namun tuntutan itu ditolak oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (Anandakusuma, 1966: 85-87)

Setelah peristiwa itu, terjadi polemik antara intelektual Bali Hindu dengan intelektual Islam politik dalam Kementerian Agama Republik Indonesia (*Bhakti*, 15 September 1952). Intensitas polemik semakin meningkat pada tahun 1953, setelah munculnya wacana mengenai berdirinya Negara Islam Indonesia (*Damai*, 17 Mei 1953 : 3). Selain dalam bentuk polemik, perlawanan terhadap intelektual Islam politik dalam Kementerian Agama Republik Indonesia juga dilakukan dengan cara mendirikan Kantor Urusan Agama Daerah (kabupaten) Otonom, sebagai tandingan terhadap Kantor Urusan Agama Daerah (kabupaten) yang berada di bawah naungan Kantor Urusan Agama Propinsi Sunda Kecil (A.J. Wirjono, 1 Desember '52 : 19).

Berdirinya Kantor Urusan Agama Daerah (kabupaten) Otonom ternyata belum menyelesaikan persoalan Hindu dengan pihak Kementerian Agama Republik Indonesia. Masih ada satu persoalan lain yang belum dapat diselesaikan yakni apakah agama Bali betul-betul agama atau aliran kepercayaan? Para pelajar yang tergabung dalam oragnisasi Persatuan Siswa Indonesia Bali di Jakarta lalu menjawab pertanyaan tersebut dengan cara mengundang Pedanda Made Kemenuh, untuk memberikan ceramah keagamaan. Kegiatan ini berlangsung pada 2 Juli 1953 di asrama putri Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP), Jakarta ("Mendengarkan Tjeramah Keagamaan," *Bhakti*, 1 September 1953 : 20).

Dalam ceramah tersebut Pedanda Made Kemenuh antara lain mengatakan, agama Hindu berasal dari kata Sindu yang berarti kesucian, namun orang-orang Bali menyebutkannya sebagai agama Shiva Buddha atau agama Tirtha. Agama Bali memang mengakui banyak dewa, namun bukan berarti mengakui paham *politheisme*, sebab agama Bali juga mengenal Tuhan Yang Maha Esa yang disebut Sang Hyang Embang atau Sang Hyang Widhi, yang disebut sesuai dengan perwujudannya, yakni Shiva, Wisnu, dan Brahma, tiga wujud namun tunggal (*Bhakti*, 1 September 1953 : 20).

Pedanda Made Kemenuh lebih jauh mengatakan, agama Bali memiliki *Syahadah* yang disebut *Pacaradan* (lambang) yakni “*Aum Tat Sat Ekamewadwitiyam*” yang artinya Sang Hyang Widhi Maha Sempurna, hanya satu tidak ada duanya.⁶ Agama Hindu juga memiliki seorang nabi, yaitu Bhagawan Viasa (putra dari Bhagawan Parasara dan Dewi Satiawati) yang dilahirkan di Delta Sungai Gangga, India. Memiliki pula kitab suci, yaitu Lontar *Sarasamuscaya*, yang berisikan ajaran-ajaran *Asta Dasa Parwa* (*Bhakti*, 1 September 1953 : 20).

Uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa intelektual Bali Hindu masa kini telah menangkap pengetahuan yang tersembunyi di balik ungkapan wacana yang dilontarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk dijadikan kekuasaan dalam mensejajarkan agama Hindu dengan agama Islam. Jadi relasi-relasi kuasa sangat transparan dalam wacana keagamaan Hindu masa kini yang meliputi nama agama, filsafat dan kepercayaan ketuhanan, keberadaan sekolah agama, nama kitab suci dan ritual serta makna-makna persembahyangan.

Biarpun sudah berupaya mensejajarkan diri dengan agama Islam, namun sampai dengan pertengahan tahun 1958 perjuangan intelektual Bali Hindu dalam menuntut pengakuan status agama Hindu dari Kementerian Agama Republik Indonesia belum menunjukkan hasil. Oleh karena itu, sejumlah intelektual Bali

6 Bandingkan dengan *footnote* nomor 4 yang menyebutkan, pada tahun 1937 sudah dikenal konsep Sang Hyang Widhi, namun belum ada kesatuan pandang dalam pelaksanaannya.

Hindu melakukan gerakan aksi bersama di seluruh Indonesia. Gerakan tersebut meliputi penempelan poster, plakat, surat selebaran, penyampaian pernyataan menuntut bagian Hindu Bali kepada kantor agama setempat supaya diteruskan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia, mengadakan pawai dengan pakaian adat, dan mengikuti perkembangan berita di surat kabar *Suara Indonesia* yang menyangkut perjuangan para delegasi Bali di Jakarta (*Bhakti*, 1 September 1953 : 20).

Pada 26 Juni 1958 para pimpinan organisasi sosial-keagamaan Hindu mengadakan rapat di Kota Denpasar. Pertemuan ini melahirkan sebuah resolusi yang terdiri dari tiga tuntutan kepada pemerintah Republik Indonesia ("Pertemuan Kerdja Sama Organisasi Agama Hindu Bali Tentang Kedudukan Agama Hindu Bali Dalam Organisasi Kementerian Agama Republik Indonesia Denpasar, 26 Djuni 1958," dokumen). Pada 29 Juni 1958 lima orang pimpinan organisasi sosial-keagamaan Hindu di Bali menghadap Presiden Soekarno di Istana Tampaksiring, Gianyar, untuk mempertegas tuntutan pencantuman agama Hindu Bali sebagai bagian dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Kelima orang itu adalah Pedanda Gde Made Kemenuh (Paruman Para Pandita), I Gusti Ananda Kusuma (Satya Hindu Darma di Denpasar), Ida Bagus Wajan Gede (Yayasan Dwijendra di Denpasar), Ida Bagus Dosther (Angkatan Pemuda Hindu Bali di Denpasar), dan I Ketut Kandia (Panti Agama Hindu Bali) (Anandakusuma, 1966: 102).

Dalam kesempatan itu mereka membacakan tuntutan umat Hindu yang terdiri dari dua bagian, yaitu, meminta Presiden Soekarno memperhatikan permohonan seluruh umat Hindu Bali supaya agama Hindu Bali diberikan kedudukan sebagai bagian di Kementerian Agama Republik Indonesia dan menggunakan wibawanya kepada para pejabat Kementerian Agama Republik Indonesia sehingga tuntutan seluruh umat Hindu dapat terwujud (Anandakusuma, 1966: 103).

Presiden Soekarno memenuhi tuntutan para pimpinan organisasi sosial-keagamaan Hindu tersebut seperti terlihat dari dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Agama 5 September

1958 Nomor 2, tentang bagian Hindu Bali dalam Kementerian Agama Republik Indonesia. Setelah adanya pengakuan tersebut, pada 7 Oktober 1958 para intelektual Bali Bali menggagas pendirian majelis tertinggi umat Hindu (Panitia Perantjang Hindu-Bali Sabha, dokumen). Namun gagasan tersebut baru bisa diwujudkan pada saat penyelenggaraan konferensi Hindu pada tanggal 21-23 Februari 1959 di Gedung Fakultas Sastra Universitas Airlangga di Bali (kini Fakultas Sastra dan Budaya dan tak lama lagi akan menjadi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana), yang kemudian dikenal sebagai hari lahirnya majelis tertinggi umat Hindu.⁷

Peserta konferensi tersebut sepakat membuat sebuah keputusan, yakni mendirikan suatu dewan (majelis) yang diberi nama Parisada Dharma Hindu Bali (PDHB), sekarang sudah berubah menjadi Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI). Memasuki tahun 1960-an, para intelektual Bali Hindu memanfaatkan PDHB untuk membangun kebudayaan Bali, terutama yang menyangkut praktik-praktik keagamaan. Hal tersebut terungkap dalam konferensi yang bertema *Dharma Agrama Para Sulinggih* dan *Para Walaka Hindu Bali* di Campuan Ubud yang berlangsung 17 – 23 November 1961.

I Gusti Ngurah Bagus, salah seorang pemakalah dalam konferensi tersebut antara lain mengatakan, bahwa dalam lontar “Ciwagama” disebutkan bangunan *rong telu* (tiga ruang) di sanggah atau pura adalah tempat pemujaan Tuhan dalam konsep Trimurti, namun orang awam menyebutnya sebagai tempat pemujaan leluhur. Oleh karena itu, ia menyarankan supaya pengertian *rong telu* yang terdapat dalam pura kahyangan tiga dan pura kawitan sebagai tempat pemujaan Trimurti supaya dijadikan sebagai dogma dan disebarkan ke semua pemeluk agama Hindu. Dengan cara seperti itu, maka umat Hindu akan dapat meninggalkan unsur-unsur lokal dan pemujaan leluhur

7 Dalam hal ini, para intelektual Bali Hindu jauh tertinggal dari para intelektual Bali Kristen, yang pada tahun 1949 sudah memiliki sinode (Gereja Kristen Protestan Bali). Hasil wawancara dengan Pendeta Tjatra Puspita, di Dalung Badung, umur 65 tahun, tanggal 17 Oktober 2002.

dalam upaya menuju bentuk Hindu universal.

Sesudah konferensi tersebut berakhir, para intelektual Bali Hindu tampak disibukkan oleh keinginan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan Kementerian Agama Republik Indonesia, bahwa agama Hindu Bali benar-benar bersifat monotheis. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibangun altar pemujaan padmasana di Pura Jagatnatha di Denpasar berdasarkan SK No. KPTS-128/6/1962, Panglima Daerah XVI/Udayana, 25 Juni 1962 (Anandakusuma, 1966: 114–115). Berbeda dengan pura pada umumnya yang biasanya berisikan berbagai macam dan bentuk altar pemujaan, di Pura Jagatnatha hanya ada sebuah altar pemujaan berupa *padmasana* tunggal. Fakta sejarah tersebut menunjukkan, pernyataan intelektual Bali Hindu masa kini yang mengatakan Pura Jagatnatha dibangun tahun 1970, seperti disebutkan diawal artikel ini tidak ditulis berdasarkan sumber sejarah kredibel.

Jadi, bisa pula dikatakan intelektual Hindu Bali masa kini tersebut tidak mengetahui bahwa ada relasi-relasi kuasa dalam sejarah berdirinya Pura Jagatnatha, yakni menunjukkan diri sebagai agama monotheis di hadapan orang-orang Islam politik, sebab seperti yang disebutkan oleh I Gusti Ngurah Bagus, jika hanya untuk memuja Tuhan cukup dilakukan pada altar pemujaan *rong telu*, baik yang berada di dalam pura kahyangan maupun kawitan. Sebab altar pemujaan *rong telu* adalah tempat pemujaan Tuhan dalam konsep Trimurti, yakni Brahma, Wisnu, dan Siwa, yang jika diperas akan menjadi berbentuk tunggal, yakni Sanghyang Widhi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Demi memperlihatkan sifat agama Hindu sebagai monotheis tersebut, maka dibuat altar pemujaan *padmasana*. Namun, bukan hanya dibangun di Pura Jagatnatha, tetapi juga dalam setiap pura kahyangan tiga (Anandakusuma, 1966: 16-17).

Adanya kebijakan tersebut semakin memperjelaskan bahwa dalam praktik keagamaan masyarakat luas, termasuk di dalamnya para pengambil kebijakan dalam agama Hindu, *rong telu* adalah tempat altar pemujaan leluhur bukan merupakan tempat pemujaan Tuhan dalam konsep Trimurti seperti yang

berada dalam fakta mental kaum intelektual atau akademisi. Dengan demikian, kebijakan membangun sebuah altar pemujaan *padmasana* pada setiap pura kahyangan tiga tidak dimaksudkan untuk membuat simbol Tapak Dara tentu tidak begitu saja bisa disebut sebagai upaya untuk membuat simbol simbol Tapak Dara (+), sebab konsep ini sangat multitafsir. Simbol ini tidak saja bisa dimaknai sebagai pertemuan antara Tuhan dalam konsep vertikal dengan horizontal, tetapi bisa pula sebagai pertemuan antara agama Shiva dan Buddha seperti yang diyakini oleh sejumlah intelektual Bali Hindu masa kini.

Berdasarkan analisis tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa altar pemujaan *padmasana* yang merupakan simbol agama Hindu bersifat *monotheis* baru dikenal sesudah adanya tuntutan dari kelompok Islam politik dalam Kementerian Agama Republik Indonesia pada awal tahun 1950-an.

Penutup

Tidak ada satu pun prasasti yang menyebutkan pernah ada rapat tokoh-tokoh agama di Pura Samuantiga pada zaman Bali Bali Kuno (abad X hingga XIV). Tidak ada pula bukti artefak yang memberitakan ada pertentangan sebelas aliran kepercayaan, sehingga harus disatukan menjadi tiga, Brahma, Wisnu, Shiva yang disebut Trimurti. Di zaman Bali Kuno yang terjadi justru toleransi keagamaan. Setiap raja selalu memberikan perhatian istimewa kepada tokoh-tokoh agama yang berbeda keyakinan dengan agama yang dianutnya. Siapa pun yang berkuasa sebagai raja tidak pernah sampai menghancurkan agama-agama lain.

Dengan demikian, jika dilihat dari sudut pandang Arkeologi, konsep Trimurti dapat disebut sebagai “*invented religion*.” Itu berarti praktik pemujaan Tuhan dalam konsep Trimurti di Pura Samuantiga yang terwariskan hingga masa kini bukan merupakan kesinambungan wacana abad X seperti yang dinyatakan oleh sejumlah intelektual Bali Hindu masa kini. Oleh karena itu, praktik pemujaan Trimurti di Pura Samuantiga bisa disebut sebagai praktik agama yang ditemuipertakan, dibangun, dan diwujudkan secara resmi. Bisa pula disebut sebagai tradisi

keagamaan yang muncul dalam waktu relatif singkat, yang dalam beberapa tahun saja dianggap sebagai praktik agama Hindu yang mapan.

Demikian pula praktik pemujaan Tuhan dalam konsep Sang Hyang Tunggal (seperti yang diartikan sebagai Tuhan yang Maha Esa dalam sila pertama Pancasila) pada altar *padmasana* tunggal di Pura Jagatnatha bukan pula merupakan kesinambungan wacana keagamaan di masa lampau. Praktik pemujaan itu berasal dari sebuah wacana yang muncul dan berkembang sejak tahun 1950-an ketika agama Bali mendapat serangan dari kelompok Islam politik dalam Kementerian Agama Republik Indonesia.

Simpulan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa para ahli masih berbeda pendapat mengenai sejarah kelahiran altar pemujaan *padmasana* tunggal. Pendapat yang satu mengatakan Danghyang Nirartha adalah kreator *padmasana* tunggal. Sedangkan pendapat yang lain menyebutkan *padmasana* bukan diciptakan oleh Danghyang Nirartha, melainkan hanya sebuah altar pemujaan yang diperuntukkan kepadanya. Keberadaan *padmasana* di Pura Besakih baru dimulai pada abad XIX.

Siapa pun yang dihadapkan pada data sejarah yang berlawanan seperti itu apalagi yang semata-mata disusun berdasarkan pada sumber sejarah tradisional, pasti akan kesulitan dalam menentukan pilihan mana yang benar dari dua pendapat tersebut. Sekalipun berlawanan, ada suatu hal yang yang bisa dipetik kedua pendapat tersebut. Sebab, baik Ida Bagus Sideman maupun Stuart Fox sama-sama mengatakan bahwa *padmasana* tunggal adalah tempat pemujaan Siwa-Raditya, Siwa sebagai penguasa matahari. Itu artinya sampai dengan abad XIX belum ada istilah Sang Hyang Tunggal, terutama dalam pengertiannya sebagai Tuhan Yang Maha Esa seperti yang terungkap pada sila pertama Pancasila.

Konsep Sang Hyang Tunggal baru mulai dikenal pada tahun 1930-an, namun belum ada kesatuan pandang dalam pelaksanaannya. Saat itu Sang Hyang Widhi masih dianalogikan sebagai raja yang memiliki banyak bawahan. Pejabat bawahan

Sang Hyang Widhi adalah para dewa yang wajib disembah. Jadi, masih cenderung ke pola agama politeisme. Barulah di tahun 1950-an istilah Sang Hyang Widhi mulai dipakai untuk menerjemahkan Tuhan Yang Maha Esa seperti yang dimaknai dalam sila pertama Pancasila. Ini merupakan bagian upaya dari para intelektual Bali Hindu Bali untuk memperlihatkan kepada orang lain bahwa agama Bali betul-betul bersifat tunggal seperti yang dipersyaratkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Namun dalam praktiknya, sebagian besar orang Bali Hindu hingga sekarang ini masih belum bisa melakukan praktek pemujaan Tuhan hanya pada altar padmasana, melainkan tetap pada berbagai macam jenis bentuk dan fungsi altar pemujaan, antara lain *rong telu*, *kahyangan* tiga, dan *pura melanting*.

Atas dasar uraian tersebut dapat ditarik sebuah simpulan, bahwa praktik pemujaan Tuhan, baik dalam konsep Trimurti di Pura Samuantiga maupun pada altar padmasana dibelit relasi-relasi kuasa. Tujuannya adalah untuk menjaga eksistensi Hindu di tengah-tengah “samudra” Islam, sehingga dapat dikatakan bahwa praktik keagamaan tersebut hanya sebuah “invented religion.”

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Prof Dr. Bambang Purwanto, M.A., yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk tampil sebagai pemakalah dalam konferensi tersebut. Terima kasih kepada Prof. Mark Hobart dan Richard Fox Ph.D. yang telah memberikan masukan saat proses revisi, sekalipun maaf tidak semua saran bisa dimasukkan. Terima kasih pula I Nyoman Darma Putra yang tidak saja bersedia mengoreksi teknik penulisan agar sesuai dengan aturan *Jurnal Kajian Bali*, juga atas pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik.

DAFTAR PUSTAKA

“Anggaran Dasar Madjelis Hinduisme.” Dokumen aslinya Sri Rsi Ananda Kusuma, Alm., dan foto kopinya ada pada Kantor Sejarawan Profesional Tri Sadhana Putra (TSP) *Art and Science Writing*.

- Anonim. 2014. "Ciwa-Budha-Konsep Dasar," Bali Spiritual Center, Paguyuban Dharma Giri Utama, Jumat 24 Agustus 2009/ diakses via Google.Com 15 Mei.
- Anonim. 2014. "Pura Jagatnatha," <http://stitidharma.org/> diakses 15 Mei.
- Anonim. 2014. "Sejarah Kerajaan Gelgel: Awal berdirinya," diposkan oleh Lanang Dawan/ diakses via Google.Com. 29 Januari.
- Anonim 1929. "Lain Doeloe Lain Sekarang Sabda K.T. Caron Waktu Memasrahkan Pangkat Anak Agung," *Bali Adnjana*, Tanpa Nomor, 27 November, Tahun VI.
- A.J. Wirjono, 1952. "Bagaimana dengan Kantor Agama," *Bhakti*, Tahun 1, 1 Desember.
- Anandakusuma, I.G.R.. 1966. *Pergolakan Hindu Dharma II*. Denpasar: Pustaka Balimas.
- Bakker, Frederik Lambertus. 1993. *The Struggle of the Hindu Balinese Intellectuals: Developments in Modern Thinking in Independent Indonesia*. Amsterdam: VU University Press.
- Foucault, Michel. 1980. *Power/Knowledge*, Colin Gordon, ed., trans. Colin Gordon, Leo Marshall, John Mepham, Kate Soper. Sussex: The Harvester Press.
- Gobyah, I Ketut. 2014. "Memuja Batara Tri Purusa." *Bali Post Online*, 3 Januari 2007/ diakses 15 Mei.
- Gora Sirikan. 1956. "Pulau Bali dalam Masa-Masa yang Lampau, Jilid I."
- Goris, R..1948. *Sejarah Bali Kuno*. Singaraja: tanpa penerbit, Oktober-November.
- Gramsci, Antonio. 1971. *Slection From The Prison Notebooks*, edited and translated by Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith. New York: International Publisher.
- Howe, Leo. 2001. *Hinduism a Hierarchy in Bali*. American Southwest : SAR Press.
- Konrad Kebung. 2002. "Kembalinya Moral Melalui Seks," *Basis*, No. 01 – 02, Tahun Ke- 51, Januari-Februari.
- Moeflich Hasbullah, 2012. "Konstruksi Pemikiran Michel Foucault Tentang Sejarah"/ diakses via <https://moeflich.wordpress.com/> diakses 19 Oktober.
- "Notulen Verslang (*sic*) dari Congress PP di Singaradja pada tanggal 16 s/d 19 Nopember 1949." Dokumen ini milik Prof. Dr. I Gusti Ngu-rah Bagus, Alm., dan foto kopinya ada pada Kantor Sejarawan Profesional Tri Sadhana Putra (*TSP Art and Science Writing*).

- Panetja, Gde. 1937. "Kebingoengan kita tentang agama," *Djatajoe*, No. 4, 25 November. Th. Ka 2.
- Pandit Shastri, N.D. 1963. *Sejarah Bali Dwipa Djilid I*. Denpasar. Bhuva Saraswati.
- Pandji Tisna, I Goesti N. 1936. "Sejak bilakah Poelau Bali mendapat peradaban Hindoe," *Djatajoe*, No. 5, 25 December, Taheen ka 1.
- "Pertemuan Kerdja Sama Organisasi Agama Hindu Bali Tentang Kedudukan Agama Hindu Bali Dalam Organisasi Kementerian Agama Republik Indonesia Denpasar, 26 Djuni. 1958." Dokumen ini milik Prof. Dr. I Gusti Ngurah Bagus, Alm., dan foto kopinya ada pada Kantor Sejarahwan Profesional Tri Sadhana Putra (TSP) *Art and Science Writing*.
- Philpott, Simon. 2003. *Meruntuhkan Indonesia: Politik Postkolonial dan Otoritarianisme*, terj. Nuruddin Mhd. Ali, Uzair Fauzan. Yogyakarta: LKIS.
- Piliang, Yasraf Amir. 2004. *Dunia Yang Dilipat, Tamasya Melampaui Batas-batas Kebudayaan*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Redaktur Keliling Kita. 1953. "Mendengarkan Tjeramah Keagamaan," *Bhakti*, Th. II. 1 September.
- Richard. J. Evans. 1997. *In Defence of History*. London: Granta Book.
- "Sejarah Pura Samuantiga," <http://nyomanadnyana.blogspot.co.id/> diakses 15 Mei 2014).
- Sidemen, Ida Bagus. "Seribu Tahun Petanu-Pakerisan: Lembah Budaya yang Menyejarah 914-1899.
- Stuart-Fox, David J. 2010. *Pura Besakih Pura, Agama, dan Masyarakat Bali*. Jakarta: Pustaka Larasan, Udayana University Press, KITLV.
- Sugriwa, I Gst. Bgs. 1953. "Rasa-tjinta terhadap kesatuan-bangsa," *Damai*, No. 3, Tahun ke- I, 17 Mei.
- Swellengrebel, J.L. 1960. "Some Religious Problems of Todyas," *Bali: Studies in Life, Thought, and Ritual*, J.L. Swellengrebel, et al., ed. Amsterdam: The Royal Tropical Institute.
- Wastu, M. 1968, "Menjambut Sabha ke-II Parisada Hindu Dharma," *Suluh Marhaen Edisi Bali*, 29 Nopember.
- Wedastera Suyasa. 1952. "Agama Hindu Bali Terancam," *Bhakti*, Th. 1, 15 September.